



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
NOMOR 594/PPID-HM/IV/2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Penggunaan Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- d. bahwa telah dilaksanakan uji konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Ketenagakerjaan RI dan telah dituangkan dalam Berita Acara Uji Konsekuensi pada tanggal 17 April 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1265).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI.
- Pertama : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Ketenagakerjaan Nomor /PPID-HM/IV/2023 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Ketenagakerjaan RI ini merupakan informasi yang dikecualikan.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Jenderal;
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
3. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
4. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
5. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
6. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
7. Para Kepala Biro/Pusat, para Sekretaris Itjen/Badan/Ditjen di Kementerian Ketenagakerjaan.

Ditetapkan Di Jakarta
Pada Tanggal: 17 April 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI,



Chair Wadhly Harahap, S.E., M.M.
NIP. 19750825 200501 1 001

LAMPIRAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
NOMOR 594 /PPID-HM/IV/2023
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh belas bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kementerian Ketenagakerjaan RI Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data Individu <i>by name by address</i> a. ASN dan Non ASN b. Peserta Diklat c. Alumni Diklat	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 84 dan Pasal 85 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 37	Penyalahgunaan data pribadi untuk kejahatan atau komersial	Pelindungan data privasi (data hanya untuk analisis internal, bukan konsumsi publik)	Sampai ada persetujuan tertulis dari Individu yang bersangkutan dan atau adanya permintaan resmi untuk kebutuhan analisis internal pemerintahan atau penyidikan tindakkejahatan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Tahun 2007 Pasal 58 tentang pelaksanaan UU Administrasi kependudukan			
2	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip Pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 66 ayat 3 huruf d tentang Kearsipan	Mengungkap dokumen yang menurut sifatnya dirahaskan	Kerahasiaan lokasi terjaga	Selama masih berlaku
3	Disposisi Surat Pimpinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari yang diberikan disposisi
4	Rincian Hasil Uji Peserta Diklat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Melindungi rahasia pribadi seorang ASN	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang Bersangkutan
5	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan Peserta Diklat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Melindungi rahasia pribadi seorang ASN	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang Bersangkutan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
6	Data Hasil Evaluasi Kinerja ASN/Pejabat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Melindungi rahasia pribadi seorang ASN	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang Bersangkutan
7	Arsip Dinamis yang berisikan Dokumen Keuangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 44 ayat 1 dan 2 tentang Kearsipan	Menghambat proses penegakan hukum	Menyediakan data lengkap yang dilindungi	Selama masih berlaku
8	Draft Modul Pembelajaran: a. Modul Latsar CPNS b. Modul Diklat PKP dan PKA c. Modul Diklat Teknis dan Fungsional pada <i>Learning Management System</i>	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 58 tentang Hak Cipta	Menghambat hak atas pembuatan karya cipta	Menyediakan data lengkap yang dilindungi	Selama masih berlaku

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
9	Data individu <i>by name by address</i> Pada Aplikasi Karirhub terdiri dari: 1. Pencari Kerja 2. Pemberi Kerja 3. Admin Pengelola	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 84 ayat 1 dan Pasal 85 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data pribadi untuk kejahatan atau komersial	Pelindungan data privasi (data hanya untuk analisis internal, bukan konsumsi publik)	Ditutup kecuali dengan permintaan resmi untuk kebutuhan analisis internal pemerintahan atau penyidikan tindak kejahatan
10	Data yang berisikan identitas responden survei	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 84 ayat 1 dan Pasal 85 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data pribadi untuk kejahatan atau komersial	Pelindungan data privasi (data hanya untuk analisis internal, bukan konsumsi publik)	Ditutup kecuali terdapat permintaan resmi dari pihak pemerintah untuk kegiatan tertentu
11	Dokumen Pribadi Mitra dalam Perjanjian Kerja Sama	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 84 ayat 1 dan Pasal 85 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 58 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan	Mengungkap dokumen pribadi mitra	Pelindungan data privasi (data hanya untuk analisis internal, bukan konsumsi publik)	Ditutup kecuali dengan permintaan resmi untuk kebutuhan analisis internal pemerintahan atau penyidikan tindak kejahatan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
12	Dokumen - dokumen dalam beracara di persidangan: a. Keterangan pemerintah; b. Tanggapan/jawaban pemerintah; c. Kesimpulan pemerintah; d. Replik/duplik; e. Alat bukti; f. Kesimpulan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf i tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 11 ayat (1) huruf g tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan.	Akan menimbulkan kerugian Pemerintah dalam hal penanganan perkara	a. Dapat melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa. b. Mencegah timbulnya permasalahan baru. c. Menjaga kerahasiaan Dokumen Persidangan terutama alat bukti.	Sampai persidangan dimulai dan mendapat putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau inchract
13	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b,e,h,i,j tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 58 tentang Hak Cipta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 51 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan Pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan Pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat mengganggu kepentingan Pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan Pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama proses pemilihan berlangsung
14	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahap Pemilihan,	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 poin b tentang keterbukaan informasi publik	Dapat mengganggu kepentingan Pelindungan hak	Pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan Pelindungan dari	Selama proses pemilihan berlangsung

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	terdiri dari: 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 3. Spesifikasi Teknis; 4. Rancangan Kontrak; 5. Dokumen Persyaratan Proses pemilihan atau Lembar Data Pemilihan; 6. Daftar Kuantitas dan Harga; 7. Gambar Rancangan Pekerjaan; 8. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 58 tentang Hak Cipta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	atas kekayaan intelektual dan Pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat	persaingan usaha tidak sehat	
	9. Dokumen Penawaran Penyedia: a. Surat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 poin b tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali	Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali	a. Penawaran Teknis: 10 tahun; b. Penawaran Harga: Selama proses pemilihan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Penawaran Penyedia; b. Penawaran teknis; c. Penawaran Harga; d. Rincian Harga Penawaran; e. Isian kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/ isian kualifikasi). f. Sertifikat/Lisensi yg masih berlaku dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 58 tentang Hak Cipta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran. Dapat mengganggu kepentingan Pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan Pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat	penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran. Dapat mengganggu kepentingan Pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan Pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat	berlangsung c. Rincian Harga Penawaran: 10 tahun d. Isian Kualifikasi: Selama proses pemilihan berlangsung
	10. Berita Acara Pemberian Penjelasan; 11. Berita Acara Pengumuman Negosiasi; 12. Jawaban Sanggah;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 poin b tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 58 tentang Hak Cipta	- Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran	Pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan Pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama proses pemilihan berlangsung dan jika mengandung informasi dikecualikan, jangka waktu disesuaikan dengan UU yang berlaku

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	<p>13. Jawaban Sanggah Banding;</p> <p>14. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;</p> <p>15. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;</p> <p>16. Kertas Kerja Evaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi)</p>	<p>Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	<p>sebelum waktu pembukaan penawaran.</p> <p>- Dapat mengganggu kepentingan Pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan Pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>- Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)</p>		
15	<p>Tahap Pelaksanaan, terdiri dari:</p> <p>1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi yang</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 poin b, h angka 3 dan poin j tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya</p>	<p>Dapat mengganggu kepentingan Pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan Pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan Pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>30 Tahun (poin 1)</p> <p>30 Tahun (poin 2,3,4)</p>

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	<p>dikecualikan;</p> <p>2. Surat Tagihan;</p> <p>3. Surat Perintah Membayar;</p> <p>4. Surat Perintah Pencairan Dana;</p> <p>5. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi);</p> <p>6. Laporan Penyelesaian Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi);</p> <p>7. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;</p> <p>8. Berita Acara Serah Terima Sementara atau <i>Provisional Hand Over</i>;</p> <p>9. Berita Acara Serah Terima atau Final <i>Hand Over</i></p>	<p>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 58 tentang Hak Cipta</p> <p>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>			<p>70 Tahun (poin 5,6)</p> <p>Dikecualikan sampai serah terima akhir pekerjaan (poin 7,8,9)</p>

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
16	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 1, huruf I tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan dan pengungkapan data instansi yang berwenang	Pelindungan data dan proses pengawasan oleh instansi berwenang	Ditutup kecuali terdapat permintaan resmi dari pihak/instansi/lembaga pemerintah untuk kegiatan tertentu
17	Data Kerugian Negara, Penetapan dan Penghapusan Tuntutan Ganti Rugi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 1, huruf i tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Ketenagakerjaan	Penyalahgunaan dan pengungkapan data rahasia pribadi, dan instansi yang berwenang	Pelindungan data pribadi dan proses pengawasan oleh instansi berwenang	Ditutup kecuali terdapat permintaan resmi dari pihak/instansi/lembaga pemerintah untuk kegiatan tertentu
18	SK Petikan Perseorangan Pengelola Keuangan Kementerian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 1 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi, Penyalahgunaan data pribadi untuk keperluan komersial dan kriminal	Melindungi data suatu instansi/individu yang bersifat rahasia/pribadi	Ditutup kecuali terdapat permintaan resmi dari pihak/instansi/lembaga pemerintah untuk kegiatan tertentu
19	Pengelolaan Barang Milik Negara/Aset: - Penyimpanan BMN - Distribusi BMN - Inventaris BMN - Rencana Kebutuhan BMN	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Ketenagakerjaan	Dapat mengganggu kinerja Kementerian	Pelindungan Barang Milik Negara/Aset	Ditutup kecuali terdapat permintaan resmi dari pihak/instansi/lembaga pemerintah untuk kegiatan tertentu

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	- Penghapusan BMN				
20	Surat Perintah Membayar (SPM) Kementerian	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Ketenagakerjaan	Dapat mengganggu kinerja Kementerian	Pelindungan Data SPM	Ditutup kecuali terdapat permintaan resmi dari pihak/instansi/lembaga pemerintah untuk kegiatan tertentu
21	Laporan Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Ketenagakerjaan	Mengungkap data kerugian negara hasil pemeriksaan BPK dan Itjen Sekretariat Jenderal	Pelindungan data suatu instansi yang bersifat rahasia	Ditutup kecuali terdapat permintaan resmi dari pihak/instansi/lembaga pemerintah untuk kegiatan tertentu
22	Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang belum dipublikasikan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 58 tentang Hak Cipta	Dapat Mengganggu Pelindungan Hak atas kekayaan Intelektual	Pelindungan Hak atas kekayaan Intelektual	Setelah penelitian di Publikasikan
23	Hasil Tes Psikostes Penerimaan Mahasiswa Baru	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Membuka Rahasia Pribadi terkait kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan Calon Mahasiswa	Pelindungan Rahasia Pribadi Calon Mahasiswa	5 (lima) Tahun
24	Data individu <i>by name by address</i> : 1. Tenaga Kerja	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 84 dan Pasal 85 Tentang Administrasi Kependudukan	Mengungkap rahasia pribadi, Penyalahgunaan	Pelindungan data suatu instansi/individu	Ditutup kecuali terdapat permintaan resmi dari pihak/instansi/

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Mandiri; 2. Padat Karya; 3. Tenaga Kerja Sukarela; 4. Petugas Antar Kerja.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 58 tentang pelaksanaan Undang-Undang Administrasi kependudukan	data pribadi untuk keperluan komersial dan kriminal	yang bersifat rahasia/pribadi	lembaga pemerintah untuk kegiatan tertentu
25	Data individu by name by address: • Peserta pelatihan • Alumni pelatihan • Asesi • Instruktur • Tenaga pelatihan • Asesor kompetensi • Lembaga Pelatihan Kerja	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 84 dan Pasal 85 Tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 58 tentang pelaksanaan Undang-Undang Administrasi kependudukan	Mengungkap rahasia pribadi, Penyalahgunaan data pribadi untuk keperluan komersial dan kriminal	Pelindungan data suatu instansi/individu yang bersifat rahasia/pribadi	Ditutup kecuali terdapat permintaan resmi dari pihak/instansi/ lembaga pemerintah untuk kegiatan tertentu
26	Proses Penyusunan Struktur dan Skala Upah Perusahaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Dapat mengganggu kepentingan Pelindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pelindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Pelindungan usaha tidak sehat	Sampai diterbitkannya hasil penghitungan struktur dan skala upah

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat			
27	Proses Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 17 huruf a tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Dapat memperlancar proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Sampai selesainya proses penyelesaian perselisihan Hubungan industrial
28	Data individu <i>by name by address</i> Penerima Manfaat Bantuan Subsidi Upah	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 84 dan Pasal 85 Tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah (PP) No.37 Tahun 2007 Pasal 58 tentang pelaksanaan Undang-Undang Administrasi kependudukan	Mengungkap rahasia pribadi, Penyalahgunaan data pribadi untuk keperluan komersial dan kriminal	Pelindungan data suatu instansi/individu yang bersifat rahasia/pribadi	Ditutup kecuali terdapat permintaan resmi dari pihak/instansi/ lembaga pemerintah untuk kegiatan tertentu
29	Dokumen Kelengkapan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap dokumen mitra	Pelindungan data mitra (data hanya untuk analisis internal, bukan konsumsi publik)	Ditutup kecuali dengan permintaan resmi untuk kebutuhan analisis internal pemerintahan atau penyidikan tindak kejahatan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 28 tahun 2014 Pasal 6 ayat (3) huruf b tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama			
30	Nota Pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses hukum tindak pidana ketenagakerjaan	Memperlancar proses hukum tindak pidana Ketenagakerjaan	Ditutup kecuali dengan permintaan resmi untuk kebutuhan analisis internal pemerintahan atau penyidikan tindak kejahatan
31	Data individu <i>by name by address</i> : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU); 2. Penerima Manfaat Kartu Prakerja; 3. Narasumber; 4. Responden wawancara; 5. Pengisi Kuesioner penelitian/kajian/analisis kebijakan. 	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 84 dan Pasal 85 Tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 58 tentang pelaksanaan Undang-Undang Administrasi kependudukan	Mengungkap rahasia pribadi, Penyalahgunaan data pribadi untuk keperluan komersial dan kriminal	Pelindungan data suatu instansi/individu yang bersifat rahasia/pribadi	Ditutup kecuali terdapat permintaan resmi dari pihak/instansi/ lembaga pemerintah untuk kegiatan tertentu

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
32	Hasil penelitian, kajian, dan analisis kebijakan yang sementara maupun yang sudah final untuk keperluan pembahasan kebijakan internal	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 58 tentang Hak Cipta	Dapat Mengganggu Pelindungan Hak atas kekayaan Intelektual	Pelindungan Hak atas kekayaan Intelektual	Setelah dikeluarkannya kebijakan
33	Laporan Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 11 ayat (1) huruf f tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian	Dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misal untuk pemerasan, intimidasi, potensi ancaman, dll.	Pelindungan pihak-pihak yang terkait dalam pemeriksaan.	Sampai selesai ditindaklanjuti oleh unit eselon I.
34	Pengaduan masyarakat terkait dengan: pelapor, terlapor, substansi pengaduan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 1 dan angka 2 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (1) huruf i tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Keputusan Menteri Ketenagakerjaan	Berpotensi mengakibatkan ancaman terhadap pelapor, terlapor.	Pencegahan kemungkinan terjadi ancaman terhadap pelapor, terlapor.	Ditutup kecuali dengan permintaan resmi untuk kebutuhan analisis internal pemerintahan atau penyidikan tindak kejahatan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Nomor 371 Tahun 2015 Bab III huruf A tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran di Kementerian Ketenagakerjaan			
35	Identitas pelapor yang minta Pelindungan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 2 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (1) huruf i tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban</p> <p>Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 371 Tahun 2015 Bab III huruf A tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran di Kementerian Ketenagakerjaan</p>	Dapat mengakibatkan ancaman terhadap pelapor dan terlapor	Pelindungan terhadap pelapor dan terlapor	Sampai jangka waktu pelindungan yang diberikan oleh LPSK
36	Laporan terkait tindak pidana korupsi yang diteruskan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 1 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 371 Tahun 2015 Bab III huruf A tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran di Kementerian Ketenagakerjaan</p>	Dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk pemerasan, intimidasi, ancaman, dll.	Pelindungan pihak-pihak yang terkait dalam pemeriksaan.	Sampai selesai ditindaklanjuti oleh unit eselon I.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
37	Identitas Pelapor Penerimaan/ Penolakan Gratifikasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 1 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2021 pasal 25 ayat 1 tentang Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan	Dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk pemerasan, intimidasi, ancaman, dll.	Pelindungan pihak-pihak yang terkait dalam pemeriksaan.	Sampai selesai ditindaklanjuti oleh unit eselon I.
38	Data Individu Pegawai	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 84 dan Pasal 85 tentang administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 58 tentang pelaksanaan Undang-Undang Administrasi kependudukan	Penyalahgunaan data pribadi untuk kejahatan atau komersial	Pelindungan data privasi (data hanya untuk analisis internal, bukan konsumsi publik)	Ditutup kecuali dengan permintaan resmi untuk kebutuhan analisis internal pemerintahan atau penyidikan tindak kejahatan
39	Data Individu Pegawai	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 84 dan Pasal 85 tentang administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun	Penyalahgunaan data pribadi untuk kejahatan atau komersial	Pelindungan data privasi (data hanya untuk analisis internal, bukan konsumsi publik)	Ditutup kecuali dengan permintaan resmi untuk kebutuhan analisis internal pemerintahan atau penyidikan tindak kejahatan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		2007 Pasal 58 tentang pelaksanaan Undang-Undang Administrasi kependudukan			
40	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip Pegawai	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 66 ayat 3 huruf d tentang Kearsipan</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penjelasan Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	Mengungkap dokumen yang menurut sifatnya dirahasiakan	Kerahasiaan lokasi terjaga	Ditutup kecuali dengan permintaan resmi untuk kebutuhan analisis internal pemerintahan atau penyidikan tindak kejahatan
41	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip Pegawai	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 66 ayat 3 huruf d tentang Kearsipan</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penjelasan Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	Mengungkap dokumen yang menurut sifatnya dirahasiakan	Kerahasiaan lokasi terjaga	Ditutup kecuali dengan permintaan resmi untuk kebutuhan analisis internal pemerintahan atau penyidikan tindak kejahatan
42	Disposisi Surat Pimpinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf I tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari Pimpinan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			penyusunan kebijakan		
43	Disposisi Surat Pimpinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf I tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari Pimpinan
44	Rincian Hasil Uji Kompetensi Alumni Pelatihan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 84 ayat 1 dan Pasal 85 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi seorang alumni pelatihan kecuali bagi Alumni yang bersangkutan	Melindungi rahasia pribadi seorang alumni pelatihan	Sampai ada persetujuan tertulis dari assesor, alumni yang bersangkutan dan LSP terkait
45	Rincian Hasil Uji Kompetensi Alumni Pelatihan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 84 ayat 1 dan Pasal 85 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi seorang alumni pelatihan kecuali bagi Alumni yang bersangkutan	Melindungi rahasia pribadi seorang alumni pelatihan	Sampai ada persetujuan tertulis dari assesor, alumni yang bersangkutan dan LSP terkait
46	Hasil Evaluasi Instruktur/Tenaga Pengajar dan Peserta Pelatihan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 84 ayat 1 dan Pasal 85 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi seorang instruktur/ tenaga pengajar dan peserta pelatihan	Melindungi rahasia pribadi seorang instruktur/ tenaga pengajar dan peserta pelatihan	Sampai ada persetujuan tertulis dari instruktur/ tenaga pengajar dan peserta pelatihan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
47	Hasil Evaluasi Instruktur/Tenaga Pengajar dan Peserta Pelatihan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 84 ayat 1 dan Pasal 85 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi seorang instruktur/tenaga pengajar dan peserta pelatihan	Melindungi rahasia pribadi seorang instruktur/tenaga pengajar dan peserta pelatihan	Sampai ada persetujuan tertulis dari instruktur/tenaga pengajar dan peserta pelatihan
48	Data Hasil Evaluasi Kinerja ASN/Pejabat	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 84 ayat 1 dan Pasal 85 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Mengungkap rahasia pribadi seorang Aparatur Sipil Negara	Melindungi rahasia pribadi seorang Aparatur Sipil Negara	Sampai ada persetujuan tertulis dari Aparatur Sipil Negara yang Bersangkutan
49	Data Hasil Evaluasi Kinerja ASN/Pejabat	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 84 ayat 1 dan Pasal 85 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Mengungkap rahasia pribadi seorang Aparatur Sipil Negara	Melindungi rahasia pribadi seorang Aparatur Sipil Negara	Sampai ada persetujuan tertulis dari Aparatur Sipil Negara yang Bersangkutan
50	Arsip Dinamis yang berisikan Dokumen Keuangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penegakan hukum serta	Menyediakan data lengkap yang dilindungi	Selama lebih dari 10 tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	dikecualikan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Realisasi Anggaran - Catatan atas laporan keuangan - Neraca - Laporan arus kas 	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 44 ayat 1 dan 2 tentang Kearsipan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Ketenagakerjaan	mengganggu tugas dan fungsi Kementerian		
51	Arsip Dinamis yang berisikan Dokumen Keuangan dikecualikan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Realisasi Anggaran - Catatan atas laporan keuangan - Neraca - Laporan arus kas 	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Pasal 44 ayat 1 dan 2 tentang Kearsipan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Ketenagakerjaan	Menghambat proses penegakan hukum serta mengganggu tugas dan fungsi Kementerian	Menyediakan data lengkap yang dilindungi	Selama lebih dari 10 tahun
52	Dokumen Pribadi Mitra dalam Perjanjian Kerja Sama	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 84 ayat 1 dan Pasal 85 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengungkap dokumen pribadi mitra	Pelindungan data privasi (data hanya untuk analisis internal, bukan konsumsi publik)	Ditutup kecuali dengan permintaan resmi untuk kebutuhan analisis internal pemerintahan atau penyidikan tindak kejahatan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik			
53	Dokumen Pribadi Mitra dalam Perjanjian Kerja Sama	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 84 ayat 1 dan Pasal 85 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap dokumen pribadi mitra	Pelindungan data privasi (data hanya untuk analisis internal, bukan konsumsi publik)	Ditutup kecuali dengan permintaan resmi untuk kebutuhan analisis internal pemerintahan atau penyidikan tindak kejahatan
54	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b,e,h,i,j tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51	Dapat mengganggu kepentingan Pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan Pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat mengganggu kepentingan Pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan Pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama proses pemilihan berlangsung
55	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b,e,h,i,j tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 51 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan Pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan Pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat mengganggu kepentingan Pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan Pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama proses pemilihan berlangsung
56	Pembinaan karir pegawai ASN	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai	Melindungi rahasia pribadi seorang Pegawai ASN	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN/Pejabat yang

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</p> <p>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Ketenagakerjaan</p>	ASN dan mengganggu tugas dan fungsi Kementerian		bersangkutan.
57	Data terkait sanksi pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 1 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi seorang Pegawai Negeri Sipil	Melindungi rahasia pribadi seorang Pegawai Negeri Sipil	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil/Pejabat yang bersangkutan.
58	<p>Dokumen Penawaran Penyedia:</p> <p>a. Surat Penawaran Penyedia;</p> <p>b. Penawaran teknis;</p> <p>c. Penawaran Harga;</p> <p>d. Rincian Harga Penawaran;</p> <p>Isian kualifikasi (Formulir/Isian Kualifikasi/ isian kualifikasi</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 poin b tentang keterbukaan informasi publik</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013</p>	Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran. Dapat mengganggu kepentingan	Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran. Dapat mengganggu kepentingan Pelindungan hak ataskekayaan	<p>a. Penawaran Teknis: 10 tahun;</p> <p>b. Penawaran Harga: Selama proses pemilihan berlangsung</p> <p>c. Rincian Harga Penawaran: 10 tahun</p> <p>d. Isian Kualifikasi: Selama proses pemilihan berlangsung</p>

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya	Pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan Pelindungan dar ipersaingan usaha tidak sehat	intelektual dan Pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
59	Dokumen Penawaran Penyedia: a. Surat Penawaran Penyedia; b. Penawaran teknis; c. Penawaran Harga; d. Rincian Harga Penawaran; Isian kualifikasi (Formulir/Isian Kualifikasi/ isian kualifikasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 poin b tentang keterbukaan informasi publik Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya	Dokumen penawaran tida kboleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran. Dapat mengganggu kepentingan Pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan Pelindungan dar ipersaingan usaha tidak sehat	Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran. Dapat mengganggu kepentingan Pelindungan hak ataskekayaan intelektual dan Pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat	a. Penawaran Teknis: 10 tahun; b. Penawaran Harga: Selama proses pemilihan berlangsung c. Rincian Harga Penawaran: 10 tahun d. Isian Kualifikasi: Selama proses pemilihan berlangsung
60	Data Hasil Pemeriksaan Kesehatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 1 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya			
61	Data Hasil Pemeriksaan Kesehatan	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 1 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya</p>	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
62	Data Surat Keputusan Kepegawaian Perseorangan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Calon Pegawai Negeri Sipil; 2. Aparatur Sipil Negara; 3. Kenaikan Pangkat; 4. Kenaikan Gaji Berkala; 5. Penilaian angka Kredit; 	<p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 1 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p>	Mengungkap rahasia pribadi seorang Aparatur Sipil Negara	Melindungi rahasia pribadi seorang Aparatur Sipil Negara	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	6. Presensi Kehadiran Pegawai; 7. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).				
63	Data Surat Keputusan Kepegawaian Perseorangan, antara lain: 1. Calon Pegawai Negeri Sipil; 2. Aparatur Sipil Negara; 3. Kenaikan Pangkat; 4. Kenaikan Gaji Berkala; 5. Penilaian angka Kredit; 6. Presensi Kehadiran Pegawai; 7. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 1 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian	Mengungkap rahasia pribadi seorang Aparatur Sipil Negara	Melindungi rahasia pribadi seorang Aparatur Sipil Negara	Sampai ada persetujuan tertulis dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.
64	Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 11 ayat (1) huruf f tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian	Dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung	Pelindungan pihak-pihak yang terkait dalam pemeriksaan.	Sampai selesai ditindaklanjuti oleh unit eselon I.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Pemerintah (APIP)	Ketenagakerjaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian	jawab, misal untuk pemerasan, intimidasi, potensi ancaman, dll.		
65	Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 11 ayat (1) huruf f tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian	Dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misal untuk pemerasan, intimidasi, potensi ancaman, dll.	Pelindungan pihak-pihak yang terkait dalam pemeriksaan.	Sampai selesai ditindaklanjuti oleh unit eselon I.
66	Laporan pengaduan masyarakat terkait dengan: pelapor, terlapor, substansi pengaduan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 1 dan angka 2 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 2 Tentang Pelindungan Saksi dan Korban	Berpotensi mengakibatkan ancaman terhadap pelapor, terlapor.	Pencegahan kemungkinan terjadi ancaman terhadap pelapor, terlapor.	Ditutup kecuali dengan permintaan resmi untuk kebutuhan analisis internal pemerintahan atau penyidikan tindak kejahatan
67	Laporan pengaduan masyarakat terkait dengan: pelapor, terlapor, substansi pengaduan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 1 dan angka 2 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi mengakibatkan ancaman terhadap pelapor, terlapor.	Pencegahan kemungkinan terjadi ancaman terhadap pelapor, terlapor.	Ditutup kecuali dengan permintaan resmi untuk kebutuhan analisis internal pemerintahan atau penyidikan tindak kejahatan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 2 Tentang Pelindungan Saksi dan Korban			
68	Identitas Pelapor Penerimaan/ Penolakan Gratifikasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 2 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2021 pasal 25 ayat 1 tentang Pengendalian Gratifikasi Bagi Pegawai dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan	Dapat digunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, misal untuk pemerasan, intimidasi, potensi ancaman	Mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan kemungkinan terjadi ancaman terhadap pelapor, terlapor.	Ditutup kecuali dengan permintaan resmi untuk kebutuhan analisis internal pemerintahan atau penyidikan tindak kejahatan
69	Identitas Pelapor Penerimaan/ Penolakan Gratifikasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 2 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2021 pasal 25 ayat 1 tentang Pengendalian Gratifikasi Bagi Pegawai dan Penyelenggara Negara di Kementerian Ketenagakerjaan	Dapat digunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, misal untuk pemerasan, intimidasi, potensi ancaman	Mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan kemungkinan terjadi ancaman terhadap pelapor, terlapor.	Ditutup kecuali dengan permintaan resmi untuk kebutuhan analisis internal pemerintahan atau penyidikan tindak kejahatan
70	Data individu by name by address: a. ASN dan Non ASN b. Peserta Diklat c. Alumni Diklat d. Instruktur e. tenaga pelatihan f. Asesor kompetensi	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 84 dan Pasal 85 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data pribadi untuk kejahatan atau komersial.	Pelindungan data privasi (data hanya untuk analisis internal, bukan konsumsi publik).	Sampai ada persetujuan tertulis dari Individu yang bersangkutan dan atau adanya permintaan resmi untuk kebutuhan analisis internal pemerintahan atau penyidikan tindak kejahatan.

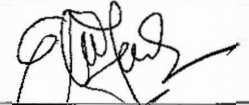
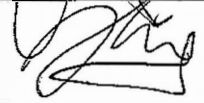

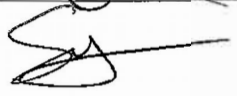
NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
71	Data individu by name by address: a. ASN dan Non ASN b. Peserta Diklat c. Alumni Diklat d. Instruktur e. tenaga pelatihan f. Asesor kompetensi	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 84 dan Pasal 85 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data pribadi untuk kejahatan atau komersial.	Pelindungan data privasi (data hanya untuk analisis internal, bukan konsumsi publik).	Sampai ada persetujuan tertulis dari Individu yang bersangkutan dan atau adanya permintaan resmi untuk kebutuhan analisis internal pemerintahan atau penyidikan tindak kejahatan.
72	Hasil Evaluasi Akhir Peserta Pelatihan Hiperkes dan K3	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data pribadi untuk kejahatan atau komersial.	Pelindungan Data Pribadi seseorang	Dikecualikan sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
73	Laporan Hasil Uji Kelayakan Lingkungan dan Kesehatan Kerja	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b tentang Keterbukaan Informasi Publik	Bersifat rahasia, yang dapat memicu persaingan usaha tidak sehat	Pelindungan Data Hasil Uji Perusahaan Bersangkutan	Sampai ada persetujuan dari pihak perusahaan yang bersangkutan
74	Rincian Hasil Uji Peserta Pelatihan K3	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data pribadi untuk kejahatan atau komersial.	Pelindungan Data Pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang Bersangkutan
75	Laporan hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan Peserta Pelatihan K3	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data pribadi untuk kejahatan atau komersial.	Pelindungan Data Pribadi ASN	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang Bersangkutan
76	Draft Modul Pembelajaran Pelatihan K3	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	Menghambat Hak atas pembuatan Hak Cipta	Pelindungan Hak Cipta	Selama proses penyusunan modul

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		tentang Hak Cipta			
77	Data individu <i>by name by address</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Peserta pelatihan • Alumni pelatihan • Asesi • Tenaga kepelatihan • Asesor kompetensi 	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 84 dan pasal 85 tentang administrasi Kependudukan</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 58 tentang pelaksanaan UU Administrasi kependudukan</p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 84 dan pasal 85 tentang administrasi Kependudukan</p>	Penyalahgunaan data pribadi untuk kejahatan atau komersial.	Pelindungan data privasi (data hanya untuk analisis internal, bukan konsumsi publik).	Sampai ada persetujuan tertulis dari Individu yang bersangkutan dan atau adanya permintaan resmi untuk kebutuhan analisis internal pemerintahan atau penyidikan tindak kejahatan.
78	Data Pribadi Penerima Manfaat Program Tenaga Kerja Mandiri	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 84 dan pasal 85 tentang administrasi Kependudukan</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 58 tentang pelaksanaan Undang-Undang Administrasi kependudukan</p>	Penyalahgunaan data pribadi untuk kejahatan atau komersial	Pelindungan data privasi (data hanya untuk analisis internal, bukan konsumsi publik)	Ditutup kecuali dengan permintaan resmi untuk kebutuhan analisis internal pemerintahan atau penyidikan tindak kejahatan.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDATANGAN
1	Nurwidiati, S.Sos	Koordinator Bidang Pendapat Umum dan Humas Internal	Biro Humas, Setjen	
2	Nyoman Indra Gunadhie, S.Sos., M.A	Subkoordinator Layanan Informasi Publik dan Pengaduan	Biro Humas, Setjen	
3	Hendri Wijaya, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Pembina	Biro Hukum, Setjen	
4	Rima Pratiwi, S.H	Subkoordinator Bidang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Biro Hukum, Setjen	
5	Edi Tugiono, S.IP, M.Si	Koordinator Bidang Persuratan dan Kearsipan Kementerian	Biro Umum, Setjen	
6	Wafa Patria	Tenaga Ahli	Biro Humas, Setjen	
7	Ahmad Fatihin	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pusat Pasar Kerja, Setjen	
8	Riyan Ridwan S	Arsiparis Ahli Pertama	Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Setjen	

9	Ahmad Riyadi, S.S, .Med.Kom	Perencana Ahli Muda	Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Setjen	
10	Raden Wahyu Hartadji, S.Kom	Pranata Komputer	Ditjen Binwasnaker dan K3	
11	Pratomo Febrianto	Pengawas Ketenagakerjaan	Ditjen Binwasnaker dan K3	
12	Hilman Nugroho	Pratana Komputer Ahli Pertama	Barenbang	
13	Rynald Erlangga Ferdian, S.Si, M.Si	Analisis Pelaporan	Itjen	
14	Angga Arie	Tenaga Perkantoran Umum	Biro Umum, Setjen	
15	Jeihan Hannisa, A.AMD.M	Pengelola Barang Milik Negara	Biro Umum, Setjen	
16	Nita Sidriannita, S.Psi	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama	Polteknaker, Setjen	
17	Yuning Tyas Pratiwi, S.E	Analisis Kepegawaian Muda	Ditjen PHI-JSK	
18	Dwi Erika Pitasari	Pranata Komputer Ahli Madya	Ditjen Binapenta dan PKK	

19	Evans Batrinixon Lumban G, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ditjen Binalavotas	
20	Muhammad Haidar Hanif	Analisis SDM Aparatur	PPSDM, Setjen	
21	Indra Aditama Suderi	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Biro Keuangan dan BMN, Setjen	
22	Sonny Sudarsono	Arsiparis Mahir	Biro OSDMA, Setjen	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
SEKRETARIS JENDERAL
SELAKU ATASAN
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,



Prof. ANWAR SANUSI, Ph.D
NIP. 19681117 199403 1 001